

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH,
AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA
(Survei Pada Desa Di Kecamatan Merapi Timur
Kabupaten Lahat Sumatera Selatan)**

Soni Hermanto, Evada Dewata, Choruddin
Politeknik Negeri Sriwijaya
soni94.hermanto@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Merapi Timur Sumatera Selatan. Ada 13 desa di Kecamatan Merapi Timur Sumatera Selatan yang menjadi populasi penelitian ini. Pengambilan Sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel jenuh. Sampel dalam penelitian ini adalah $13 \times 5 = 65$ orang yang terdiri dari Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kaur Keuangan, Ketua BPD dan Perwakilan Masyarakat yang ada di Kecamatan Merapi Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dan diolah menggunakan bantuan software SPSS version 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa dan Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Merapi Timur Sumatera Selatan.

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa.

Abstract. The purpose of this research was to know the influence of internal control system and the accessibility of financial statements to accountability of village fund finance management in Merapi Timur Districts, Lahat Regency, South Sumatera. There are 13 vilalage in Merapi Timur Districts are population. Sampling in this study using saturated samples . The sample in this study was 65 people, they are the head of the village, the secretary of the village, the treasurer of the village, section head, and village consultative agency to each village in Merapi Timur District. The data was the primary data that was collected through questionnaires distributed to respondents. The data were analyzed by using multiple linear regression and supported by SPSS version 22. The results showed that partially internal control system have a positive significant effect on accountability of village fund finance management variable and the accessibility of financial statements variable have a positive significant effect on accountability of village fund finance management variable. While silmultan internal control system and the accessibility of financial statements variable equally positive and significant influence on the accountability of village fund finance management in Merapi Timur Districts, Lahat Regency, South Sumatera.

Keyword: Internal Control System, the accessibility of financial statements and Accountability of Village Fund Finance Management

I. PENDAHULUAN

Perhatian terhadap desa mulai meningkat setelah dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2014 tentang desa. Undang-undang tersebut memberikan kesempatan pada desa untuk mengelola secara mandiri dana desa dan mengembangkan potensi di desa guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Dana desa yang diberikan pemerintah pusat terus mengalami peningkatan. Berdasarkan Peraturan Bupati Lahat nomor 03 tahun 2018, dana desa yang diterima Kecamatan Merapi Timur pada tahun 2018 adalah Rp 10.443.058.000 dan berdasarkan Peraturan Bupati Lahat nomor 49 tahun 2018, dana desa yang diterima Kecamatan Merapi Timur pada tahun 2019 adalah Rp.11.192.377.000, mengalami peningkatan sebesar Rp749.319.000. Peningkatan dana desa menuntut pemerintah desa untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dana desa agar asas pengelolaan keuangan yang salah satunya adalah asas akuntabel dapat terlaksana dengan maksimal. Namun fakta dilapangan menunjukkan masih ditemukan adanya desa yang belum dapat sepenuhnya menerapkan asas akuntabel. Seperti yang diberitakan oleh salah satu koran online berikut: Fauzan Khoiri Denin AP.,MM selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lahat yang disampaikan melalui Elsy Hartuti S.STP.,MM selaku kepala bidang pengelolaan keuangan dan aset desa, mengatakan “hingga maret 2019 terdapat 13 desa di Kabupaten Lahat yang belum menyampaikan laporan realisasi APBDesa tahun sebelumnya padahal pencairan untuk tahun 2019 sudah mulai berjalan” (www.amperasumsel.com/2019/03/12/13).

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin terhadap anggaran. Untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang baik, pemerintah desa dituntut memperhatikan asas-asas dalam pengelolaan keuangan, salah satu pedomannya adalah asas akuntabel.

Akuntabilitas merupakan sebuah bentuk dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran atau target yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang baik dapat dicapai melalui penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat mengetahui laporan pengelolaan keuangan desa. Sistem pengendalian intern pemerintah secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sedangkan kewajiban pemerintah desa untuk memberikan akses laporan keuangan desa disebutkan dalam pasal 72 Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

Sistem Pengendalian intern pemerintah merupakan sistem/prosedur yang ada dalam suatu organisasi untuk menjaga proses kegiatan operasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan guna pencapaian tujuan organisasi itu sendiri. Pengendalian intern adalah rancangan organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva dan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, Krismiaji (2010: 218). Penelitian Wardana (2016), Lianto (2018), Yesinia (2018) dan widyatama (2017), hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap

akuntabilitas pengelolaan keuangan. Sedangkan penelitian Santoso (2016) dan Putri (2018), hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan .

Aksesibilitas laporan keuangan adalah sarana penunjang dalam rangka menciptakan lembaga pemerintah daerah sebagai lembaga sektor publik. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemampuan dalam memberikan akses bagi stakeholder untuk mengetahui atau memperoleh laporan keuangan sebagai bagian dari partisipasi stakeholder (Aliyah dan Nahar, 2012: 142). Berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 pasal 72 pemerintah desa diwajibkan memberikan informasi atas laporan pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat secara tertulis dan melalui media informasi yang mudah diakses masyarakat seperti melalui papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Penelitian Chrystiana (2017), Wardana (2016), Sudjono (2018) dan Mustofa (2012), hasil penelitian menunjukkan bahwa Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Namun, penelitian Azizah (2014) dan Puti (2018), hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Merapi Timur Sumatera Selatan.

II. KAJIAN PUSTAKA

Pemerintah desa meliputi kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, (Permendagri Nomor 20 tahun 2018). Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa. Siklus pengelolaan keuangan desa merupakan tanggungjawab dan tugas dari kepala desa dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala urusan dan kepala seksi dan kepala urusan keuangan.

Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, menyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan Permendagri No. 20 tahun 2018 pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

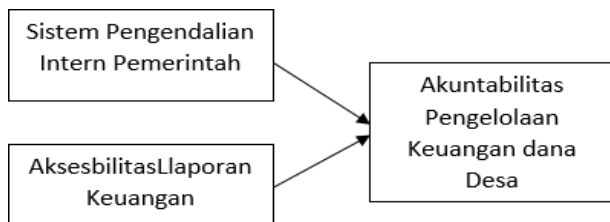
Permendagri Nomor 20 tahun 2018 menyatakan bahwa akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas adalah kewajiban dalam menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk minta keterangan mengenai pertanggungjawaban. Akuntabilitas pada pemerintahan desa melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pemerintahan desa dan masalah pembangunan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDes dengan alokasi dana desa sebagai salah satu

komponen di dalamnya. Menurut Superdi (2017) indikator akuntabilitas meliputi : Sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku; Pertanggungjawaban kepada public; Terbuka, cepat dan tepat; Penyusunan pealporan; dan Memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen.

Sistem pengendalian intern pemerintah di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mendefinisikan sistem pengendalian intern pemerintah ialah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern pemerintah memuat lima unsur yaitu lingkungan pengendalian, Penilaian risiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi dan Pemantauan pengendalian intern.

Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemampuan untuk memberikan akses bagi stakeholder untuk mengetahui atau memperoleh laporan keuangan sebagai bagian dari partisipasi stakeholder, (alياهو dan Nahar, 2012:142). Menurut lewier (2016:4) Pemerintah daerah harus mampu memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang sudah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana public. Menurut Superdi (2017), terdapat tiga indikator yang mempengaruhi aksesibilitas laporan keuangan: Terbuka di media massa, Mudah diakses dan Ketersediaan informasi.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Hipotesis Penelitian

H₁: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa.

H₂: Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di 13 desa di Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Ada 65 responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini yang terdiri dari kepala desa, sekertaris desa, ketua BPD dan 1 orang perwakilan masyarakat . Pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik penyebaran Kuesioner. Data yang diperoleh dari kuesioner diolah menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan *software SPSS*

version

22.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Pengujian Hipotesis
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 1
Hasil Analisis Regresi Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-,680	,194		-3,504	,001
a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	1,040	,048	,904	21,879	,000
Aksesibilitas Laporan Keuangan	,119	,049	,101	2,447	,017
b. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa					

Sumber: *Output SPSS* diolah, 2019

$$Y = - 680 + 1,040X_1 + 0,119X_2 + e$$

Persamaan regresi yang diperoleh dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (a) pada persamaan ini bernilai negatif sebesar -0,680 yang menjelaskan bahwa jika tidak adanya variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan maka Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa akan turun sebesar 0,680%.
2. Nilai koefisien regresi untuk variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (BX₁) bernilai positif, yaitu sebesar 1,040%. Artinya bahwa setiap peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebesar 1% maka tingkat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa akan mengalami peningkatan sebesar 1,040% dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.
3. Nilai koefisien regresi untuk variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan (BX₂) bernilai positif, yaitu sebesar 0,119. Artinya bahwa setiap peningkatan Aksesibilitas Laporan Keuangan sebesar 1% maka tingkat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa akan mengalami peningkatan sebesar 0,119% dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 2
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-,680	,194		-3,504	,001
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	1,040	,048	,904	21,879	,000
Aksesibilitas Laporan Keuangan	,119	,049	,101	2,447	,017

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Sumber: *Output SPSS* diolah, 2019

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah sebesar 21,879 dengan signifikansi 0,000. Artinya, nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Maka dengan demikian sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.

Variabel aksesibilitas laporan keuangan mempunyai nilai t_{hitung} sebesar 2,447 dengan signifikansi 0,017. Artinya, nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Maka, dengan demikian aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Tabel 3
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	10,787	2	5,394	377,230	,000 ^b
Residual	,886	62	,014		
Total	11,674	64			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa

b. Predictors: (Constant), Aksesibilitas Laporan Keuangan , Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sumber : *output SPSS version 22, 2019*

Berdasarkan tabel 3 dias, nilai F adalah sebesar 377,230 dengan taraf signifikansi 0,000. Artinya nilai F_{hitung} sebesar $377,230 >$ dari F_{tabel} 3,15. Sehingga dapat dinyatakan bahwa secara simultan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Merapi Timur.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4
Hasil Uji Koefisien Determinasi R^2
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,961 ^a	,924	,922	,11957

a. Predictors: (Constant), Aksesibilitas Laporan Keuangan , Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sumber: *Output SPSS diolah, 2019.*

Berdasarkan tabel 4 di atas nilai R square adalah 0,924 yang menunjukkan hubungan yang sangat erat antara variabel independen dan variabel dependen. Nilai R square sebesar 0,924 hal ini berarti 92,4% variasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Merapi Timur dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan. Sedangkan sisanya 7,6 % ($100\% - 92,4\%$) disebabkan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

V. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Artinya semakin meningkat sistem pengendalian intern pemerintah maka semakin baik akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Merapi Timur.
2. Aksesibilitas Laporan Keuangan secara parsial berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Artinya semakin pemerintah desa memberikan akses laporan keuangan kepada masyarakat dan pihak lainnya maka semakin tinggi akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Merapi Timur.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, adapun masukan atau saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Besarnya persentase pengaruh Sistem pengendalian Intern Pemerintahan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Merapi Timur yaitu sebesar 92,4%, hendaknya pemerintah desa dapat terus meningkatkan sistem pengendalian intern dan memberikan akses seluasnya bagi pengguna laporan keuangan sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa akan menjadi lebih baik.
2. Untuk peneliti selanjutnya, selain menggunakan metode pengumpulan data dengan menyebar kuesioner, sebaiknya peneliti juga melakukan kegiatan tanya jawab atau wawancara dengan responden terkait dengan tema yang diteliti sehingga dapat mendukung hasil data yang diperoleh melalui kuesioner yang disebar.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, Siti dan Aida, Nahar. 2012. "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah". *Jurnal Akuntansi dan Auditing*. Volume 8 No. 2: 97-189. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdlatul Ulama Jepara
- Azizah, Nur. 2014. *Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Serta Sistem Pengendalian Intenal Pemerintah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jurnal Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura.
- Bupati Lahat. Peraturan Bupati Lahat Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2018.
- Bupati Lahat. Peraturan Bupati Lahat Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019.
- Fauzani. 2018. "Analisis Persepsi Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga". *Seminar Nasional dan Call for Paper Sustainable Competitive Advantage (SCA) 8*. Universitas Jenderal Soedirman.
- Lianto, Naufal. 2018. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Sembawa. *Skripsi*. Politeknik Negeri Sriwijaya. Palembang.
- Mustofa. 2012. *Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang*. ISSN 2252-6765. Universitas Negeri Semarang.
- Putri. 2018. Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Surakarta.

- Presiden Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Presiden Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- Presiden Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Santoso. 2016. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah. *Tesis*. Universitas Lampung. Lampung
- Superdi, Rasuli dan Silfi. 2017. “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah”. *JOM Fekon*. Volume 4. Nomor 1.
- Wardana, Ibnu. 2016. “Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa”. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Semarang*. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Widyatama Arif , Novita Lola & Diarespati. 2017. “Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)”. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Volume 2. Nomor 2. Halaman 1-20.
- Yesinia. 2018. *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa*.
Jurnal ASET (Akuntansi Riset) Vol.10 | No.1 | 2018. Universitas Muhammadiyah Jember

